

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun akhir tahun 1970-an populasi Tiongkok dengan cepat mendekati angka satu miliar. Hal ini menyebabkan pemimpin baru Tiongkok, Deng Xiaoping mendorong program untuk keluarga memiliki tidak lebih dari dua anak, satu anak dianggap lebih baik. Baru pada tahun 1979 kebijakan ini mulai di diterapkan, persyaratan ketat hanya diterapkan pada beberapa provinsi. Pada tahun 1980 pemerintah kemudian mengusahakan kebijakan satu anak (atau lebih dikenal dengan *china's one child policy*). Program ini sendiri ditetapkan secara nasional, meskipun terdapat pengecualian untuk beberapa etnis minoritas atau keluarga yang memiliki anak sulung disabilitas. Kebijakan ini sendiri ditetapkan dengan lebih efektif pada wilayah urban. Hal ini sendiri dipengaruhi keluarga di wilayah rural, utamanya yang memiliki pekerjaan dibidang agraris menolak pembatasan ini. Orang tua beranggapan bahwa anak yang banyak akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan di perkebunan.

Kebijakan satu anak pertama kali diperkenalkan sebagai kebijakan nasional pada tahun 1980 melalui Surat Edaran Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara Nomor 7 Tahun 1980, yang mengatur bahwa sebagian besar pasangan hanya boleh memiliki satu anak. Meskipun sudah diuji coba secara terbatas sejak tahun 1979, kebijakan ini mulai berlaku penuh pada awal 1980-an, dengan berbagai ketentuan tambahan yang berkembang setiap dekade berikutnya.

Penerapan kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti tunjangan pendidikan, subsidi rumah, dan prioritas pekerjaan bagi keluarga yang patuh. Di sisi lain, pelanggaran terhadap kebijakan ini dikenai sanksi administratif dan ekonomi, bahkan pada masa awal penerapan terjadi praktik aborsi paksa dan sterilisasi, khususnya di daerah urban.

Peraturan ini semakin diperkuat melalui serangkaian dokumen pemerintah, di antaranya Dokumen No. 11/1991 yang menekankan pelaksanaan tegas di wilayah perkotaan, serta Dokumen No. 13/2000 yang memberikan pengecualian terbatas bagi beberapa kelompok etnis minoritas dan penduduk pedesaan yang anak pertamanya perempuan.

Perubahan regulasi yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa pengendalian populasi di Tiongkok tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan cara negara menggunakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial dan biologis warganya.

Penerapan kebijakan ini berusaha dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan akses dan pilihan alat kontrasepsi yang lebih luas, memberikan insentif untuk warga yang mematuhi. Selain itu ditetapkan juga sanksi kepada orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut, bahkan melakukan tindak aborsi paksa dan sterilisasi. Kebijakan ini juga menghasilkan konsekuensi lain diluar tujuannya sebagai bentuk usaha pengurangan pertumbuhan penduduk. Yang paling menonjol adalah adanya perbedaan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi lain dari kebijakan ini adalah bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, sementara tingkat kelahiran yang menurun. Selain itu terdapat juga kasus-kasus dimana anak-anak berikutnya setelah anak pertama tidak dilaporkan dalam catatan sipil.

Kebijakan ini sendiri diberlakukan pada sebagian besar warga Tiongkok hingga akhir tahun 2015. Pada tahun selanjutnya, keluarga diperbolehkan memiliki dua anak, namun hal ini tidak menyebabkan peningkatan angka kelahiran. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sudut pandang yang dibentuk oleh pesan dan kebijakan pembatasan jumlah anggota keluarga bahwa memiliki satu anak lebih baik.

Menurut data sensus 2020 yang menyoroti rendahnya Angkatan kerja, tingkat kelahiran dan tingginya populasi renta menyebabkan pada bulan Mei 2021 diumumkan bahwa semua pasangan menikah akan diizinkan memiliki tiga anak. Hal tersebut kemudian disahkan secara resmi pada

Agustus 2021. Selain itu, pemerintah juga menyertai kebijakan pendukung lainnya seperti dalam sector ketenagakerjaan, keuangan, Pendidikan dan pengasuhan anak untuk mengatasi alasan sosial dan ekonomi bagi pasangan yang masih ragu memiliki anak.

Kebijakan ini sendiri diharapkan mampu untuk meningkatkan kembali populasi dan tingkat kelahiran di Tiongkok sehingga mampu untuk mendorong perekonomian negara dan program-program pemerintah lainnya. Namun sayangnya, sejak kebijakan tersebut berlaku populasi dan tingkat kelahiran memang meningkat namun tidak signifikan dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan harapan pemerintah pasca pelonggaran kebijakan dua anak. Tingkat kelahiran sendiri justru menurun dari tahun 2015 hingga sekarang (United Nations Population Division- World Population Prospects, 2022).

Memahami akar penyebab pertumbuhan populasi yang menurun di Tiongkok sangat penting, karena tren ini dapat memiliki implikasi luas bagi perkembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Urbanisasi yang cepat dan meningkatnya biaya hidup, terutama di kota-kota besar, telah menciptakan hambatan keuangan yang signifikan bagi pasangan muda yang mempertimbangkan untuk memulai keluarga. Tingginya biaya perumahan, pengasuhan anak, dan biaya lain yang terkait dengan membesarkan anak dapat menghalangi individu untuk memiliki anak, membuat mereka lebih memilih untuk memprioritaskan karier dan tujuan pribadi mereka.

Ketika lebih banyak orang bermigrasi ke kota-kota untuk mencari peluang ekonomi, biaya hidup dan harga perumahan sering kali meningkat, membuat pasangan muda semakin sulit untuk memulai keluarga. Selain itu, gaya hidup perkotaan mungkin lebih menekankan pada karier dan pemenuhan individu daripada memiliki anak. Di Tiongkok, laju urbanisasi yang cepat telah menyebabkan kenaikan signifikan dalam biaya hidup, terutama di kota-kota besar. Tingginya biaya perumahan, pendidikan, dan pengasuhan anak dapat bertindak sebagai penghalang bagi pasangan muda yang mungkin ragu untuk mengambil beban keuangan membesarkan anak.

Lebih jauh lagi, sifat kehidupan perkotaan yang cepat dan kompetitif dapat menyebabkan fokus yang lebih besar pada kemajuan profesional dan tujuan pribadi, membuat beberapa individu menunda atau menghindari menjadi orang tua untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk karier mereka. Pergeseran prioritas sosial ini, ditambah dengan tantangan ekonomi kehidupan perkotaan, telah berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran yang diamati di banyak kota besar di Tiongkok.

Studi NBER menemukan bahwa kenaikan harga rumah di tingkat area metropolitan memiliki dampak negatif pada tingkat kesuburan di kalangan non-pemilik rumah. Ketika lebih banyak orang bermigrasi ke daerah perkotaan di Tiongkok, kenaikan cepat biaya perumahan di kota-kota besar dapat membuatnya secara finansial menantang bagi pasangan muda untuk memulai keluarga. Tingginya biaya perumahan, pengasuhan anak, dan pengeluaran lain yang terkait dengan membesarkan anak di lingkungan perkotaan bertindak sebagai penghalang, membuat beberapa individu menunda atau menghindari menjadi orang tua untuk fokus pada karier dan tujuan pribadi mereka.

Lebih jauh lagi, studi ini menemukan bahwa bagi pemilik rumah saat ini, kenaikan harga rumah dapat memiliki efek kekayaan positif, karena meningkatkan ekuitas rumah mereka. Ini dapat menyebabkan peningkatan bersih dalam tingkat kesuburan di kalangan pemilik rumah. Namun, di Tiongkok yang sedang mengalami urbanisasi cepat, di mana tingkat kepemilikan rumah mungkin lebih rendah, efek harga negatif dari kenaikan biaya perumahan pada non-pemilik rumah cenderung menjadi faktor dominan yang berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran di kota-kota besar.

Temuan dari studi NBER memberikan dukungan empiris untuk hubungan antara kehidupan perkotaan, keterjangkauan perumahan, dan penurunan tingkat kesuburan yang dijelaskan dalam teks yang dipilih. Tantangan ekonomi kehidupan perkotaan, terutama tingginya biaya perumahan, dapat menciptakan hambatan signifikan bagi pasangan muda di

Tiongkok yang mempertimbangkan untuk memulai keluarga, sehingga berkontribusi pada tren penurunan tingkat kelahiran yang diamati di kota-kota besar negara tersebut.

Hal ini telah mendorong pasangan muda untuk menunda atau membatasi jumlah anak yang mereka miliki, demi menjaga stabilitas keuangan keluarga dengan adanya keinginan untuk memberikan Pendidikan dan kesempatan terbaik kepada anak mendorong pasangan menikah lebih focus pada kualitas daripada kuantitas (Hsu, 2022).

Selain itu, urbanisasi yang pesat di Tiongkok telah berkontribusi pada perubahan pola pikir dan prioritas hidup masyarakat yang semakin berorientasi pada pencapaian ekonomi dan gaya hidup modern. Selain itu akses Pendidikan dan luasnya pilihan pekerjaan yang lebih baik dan lebih merata untuk perempuan juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menikah dan memiliki anak (Xu et al., 2016).

Nilai-nilai budaya tradisional Tiongkok yang menekankan keluarga besar dan memiliki banyak anak telah bergeser, dengan ukuran keluarga yang lebih kecil dan menunda atau bahkan menghindari menjadi orang tua menjadi lebih umum, terutama di kalangan generasi muda. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan kombinasi beberapa faktor, termasuk meningkatnya urbanisasi, pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, dan peluang ekonomi serta sosial yang lebih besar bagi perempuan.

Seiring dengan semakin banyaknya orang, terutama kaum muda, yang bermigrasi ke kota-kota di Tiongkok untuk mencari peluang ekonomi, gaya hidup perkotaan telah membawa penekanan yang lebih besar pada pemenuhan diri, kemajuan karier, dan tujuan pribadi. Sifat kehidupan perkotaan yang cepat dan kompetitif dapat membuat beberapa individu lebih ragu untuk mengambil tanggung jawab finansial dan waktu yang dibutuhkan untuk membesarkan anak. Selain itu, tingginya biaya perumahan, pendidikan, dan pengasuhan anak di daerah metropolitan besar dapat menjadi penghalang signifikan bagi pasangan muda yang mempertimbangkan untuk memulai keluarga.

Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya perempuan di Tiongkok yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka mungkin lebih cenderung memprioritaskan karier dan aspirasi pribadi mereka daripada memiliki anak pada usia muda. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang meningkat telah memberikan perempuan otonomi yang lebih besar dalam memutuskan apakah dan kapan akan memiliki anak, yang berkontribusi pada tren ukuran keluarga yang lebih kecil dan penundaan menjadi orang tua.

Pergeseran dalam norma sosial ini, di mana nilai-nilai tradisional yang menekankan keluarga besar beralih ke fokus yang lebih besar pada tujuan individu dan ukuran rumah tangga yang lebih kecil, sangat terasa di kalangan generasi muda di Tiongkok. Kombinasi antara urbanisasi, faktor ekonomi, dan perubahan peran gender telah menyebabkan transformasi budaya yang signifikan, dengan penurunan tingkat kelahiran yang diamati di banyak kota besar di Tiongkok mencerminkan pergeseran sosial yang lebih luas ini.

Selain faktor urbanisasi dan perubahan norma sosial, faktor ekonomi sendiri sangat berkaitan dalam penurunan populasi dan tingkat kelahiran di Tiongkok. Seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraph sebelumnya, dengan tren perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan sendiri sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi. Di daerah perkotaan, peluang kerja cenderung lebih banyak dan gaji yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini membuat banyak orang yang bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab penurunan tingkat kelahiran (Birdsall & Jamison, 1983).

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan NBER bahwa kenaikan harga rumah di tingkat area metropolitan memiliki dampak negatif pada tingkat kesuburan di kalangan non-pemilik rumah. Seiring dengan semakin banyaknya orang, termasuk pasangan muda, yang bermigrasi ke daerah perkotaan di Tiongkok, kenaikan cepat biaya perumahan di kota-kota besar

dapat membuat mereka secara finansial kesulitan untuk memulai keluarga. Tingginya biaya perumahan, pengasuhan anak, dan pengeluaran lain yang terkait dengan membesarkan anak di lingkungan perkotaan bertindak sebagai penghalang, membuat beberapa individu menunda atau menghindari menjadi orang tua untuk fokus pada karier dan tujuan pribadi mereka.

Meskipun urbanisasi membawa peluang ekonomi yang lebih baik, namun biaya hidup yang meningkat di perkotaan sering kali menjadi hambatan dalam merencanakan keluarga, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran di negara tersebut. Melalui latarbelakang tersebut, peneliti berusaha untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi keputusan untuk memiliki anak hingga tingkat populasi di Tiongkok.

Realitas ekonomi ini, ditambah dengan norma sosial yang bergeser menuju keluarga yang lebih kecil, dapat membantu menjelaskan penurunan tingkat kelahiran yang diamati di banyak kota besar di Tiongkok. Temuan studi NBER mendukung pernyataan bagaimana interaksi antara faktor ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi keputusan individu mengenai perencanaan keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada tren penurunan populasi yang lebih luas di Tiongkok yang sedang mengalami urbanisasi cepat.

Fenomena penurunan populasi ini sendiri tidak hanya menjadi isu domestic di Tiongkok, namun juga relevan dengan konteks global. Berbagai negara saat ini juga menghadapi tantangan serupa, meski dengan alasan yang berbeda. Misalnya di Jepang, Korea Selatan, dan Jerman juga mengalami penurunan tingkat kelahiran karena urbanisasi, peningkatan gaya hidup, dan perubahan nilai sosial. Hal ini memicu kekhawatiran global akan penuaan populasi, ketimpangan dalam Angkatan kerja dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, perbandingan antara Tiongkok dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya dan ekonomi memiliki faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran selain kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai interaksi antara kebijakan populasi, dinamika ekonomi, dan perubahan sosial budaya dalam konteks global.

Dengan menggali interaksi yang rumit antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena penurunan populasi dan tingkat kelahiran di Tiongkok. Pengetahuan ini dapat menginformasikan pengembangan kebijakan dan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan demografis yang dihadapi negara ini, memastikan pertumbuhan populasi yang seimbang dan berkelanjutan di masa depan. Pentingnya temuan penelitian terletak pada kemampuannya untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan intervensi yang efektif untuk mengatasi tantangan demografis dan sosial yang dihadapi Tiongkok. Memahami jaringan kompleks faktor-faktor yang mendorong penurunan populasi dan tingkat kelahiran sangat penting, karena tren ini dapat memiliki implikasi luas bagi perkembangan ekonomi dan sosial negara tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat bahwa meskipun kebijakan satu anak telah dihapus sejak 2015, angka kelahiran di Tiongkok terus mengalami penurunan signifikan. Data dari United Nations Population Division (2022) menunjukkan bahwa tingkat fertilitas total (TFR) Tiongkok saat ini berada di bawah 1,3 anak per wanita, jauh dari angka penggantian generasi sebesar 2,1. Bahkan setelah kebijakan dua anak (2015) dan tiga anak (2021) diterapkan, banyak pasangan muda tetap enggan memiliki lebih banyak anak karena alasan ekonomi dan sosial (Hsu, 2022). Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan tenaga kerja Tiongkok di masa depan, karena populasi usia produktif semakin menyusut sementara jumlah penduduk lanjut usia meningkat tajam. Feng & Mason (2005) memperkirakan bahwa pada tahun 2050, lebih dari 30% populasi Tiongkok akan berusia di atas 60 tahun, menciptakan tekanan besar pada sistem jaminan sosial dan kesehatan negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan satu anak telah membentuk pola pikir masyarakat tentang keluarga dan kelahiran,

serta bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap struktur demografi dan sosial di Tiongkok.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Dampak dari kebijakan satu anak terhadap tingkat kelahiran di Tiongkok.
2. Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin akibat kebijakan tersebut.
3. Konsekuensi sosial dan ekonomi dari perubahan struktur populasi yang disebabkan oleh kebijakan ini.
4. Implikasi kebijakan satu anak terhadap tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di masa depan

1.3. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Fokus penelitian adalah kebijakan satu anak yang diberlakukan di Tiongkok dari tahun 1980 hingga 2015 serta dampaknya hingga saat ini.
2. Analisis dilakukan terhadap aspek demografi, sosial, dan ekonomi yang terpengaruh oleh kebijakan ini.
3. Data yang digunakan bersumber dari literatur akademik, statistik resmi, serta laporan media yang kredibel.
4. Penelitian ini tidak membahas kebijakan populasi di negara lain secara mendalam, kecuali sebagai perbandingan dengan kebijakan yang diterapkan di Tiongkok

1.4. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini memiliki batasan spasial pada negara Tiongkok. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kebijakan Satu Anak Tiongkok sejak tahun 1980 hingga tahun 2015. Meskipun kebijakan tersebut telah dihapus, dampaknya terhadap populasi masih sangat signifikan, dengan implikasi serius terhadap tenaga kerja, ekonomi, dan struktur sosial di Tiongkok. Untuk itu, penulis akan memusatkan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana kebijakan tersebut

1. Bagaimana Kebijakan Satu Anak Tiongkok mempengaruhi penurunan angka kelahiran dan populasi di Tiongkok hingga saat ini?
2. Bagaimana penurunan populasi akibat kebijakan tersebut memengaruhi tatanan sosial budaya masyarakat Tiongkok saat ini?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan satu anak memengaruhi angka kelahiran dan populasi di Tiongkok.
2. Untuk menganalisis dampak penurunan populasi terhadap struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat Tiongkok.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah pengetahuan mengenai Kebijakan Satu Anak China dan dampak dari kebijakan tersebut
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi literatur dan memperkaya kajian kebijakan bagi peneliti dengan topik yang sama, khususnya kebijakan populasi
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi negara berkembang
4. Sebagai persyaratan penyelesaian studi untuk memperoleh gelas Sarjana Sastra di Universitas Hasanuddin

1.7. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dengan upaya membantu memposisikan penelitian ini dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Di bagian ini peneliti menyertakan tiga penelitian terdahulu dengan topik serupa. Yaitu "*Assessing the Impact of the Kebijakan Satu Anak in China: A Synthetic Control Approach*" oleh Giestel-Basten (2019), Efek Kebijakan Satu Anak terhadap Kehidupan Perempuan di Tiongkok: Sebuah Ironi oleh Wabilia Husna (2016), dan Analisis Penyebab Penurunan Angka Kelahiran di Tiongkok 2017-2023 oleh Grimbert pada tahun 2024. Penelitian-penelitian ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, termasuk pengaruhnya terhadap angka kelahiran, ketidakseimbangan gender, dan perubahan nilai sosial budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Grimbert (2024) dalam studinya berjudul "Analisis Penyebab Penurunan Angka Kelahiran di Tiongkok 2017-2023" berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran di Tiongkok pasca-pelonggaran kebijakan satu anak. Dengan menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif), penelitian ini menganalisis bagaimana urbanisasi, tingginya biaya hidup, dan peran perempuan dalam ekonomi memengaruhi keputusan pasangan untuk memiliki anak.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan tentang penurunan angka kelahiran pasca-2017, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian Grimbert lebih menitikberatkan pada periode setelah kebijakan dilonggarkan, sementara penelitian ini mengkaji dampak jangka panjang kebijakan satu anak dari awal penerapannya hingga saat ini, dengan melihat bagaimana kebijakan tersebut membentuk pola sosial dan struktur populasi Tiongkok dalam jangka panjang.

Penelitian Wabilia Husna (2016) dalam "Efek Kebijakan Satu Anak terhadap Kehidupan Perempuan di Tiongkok: Sebuah Ironi" menyoroti dampak kebijakan satu anak terhadap perempuan di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme dan Konfusianisme untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini memperburuk ketimpangan gender, dengan meningkatkan preferensi terhadap anak laki-laki dan memperkuat tekanan sosial terhadap perempuan.

Dalam konteks ini, penelitian Husna berkontribusi dalam memahami perubahan sosial yang muncul akibat kebijakan satu anak. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada perspektif gender, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji dampak yang lebih luas, termasuk implikasi ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Dalam studinya berjudul "Assessing the Impact of the Kebijakan Satu Anak in Tiongkok: A Synthetic Control Approach", Giestel-Basten (2019) menggunakan pendekatan Synthetic Control Method untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan satu anak dalam menekan angka kelahiran di Tiongkok. Penelitian ini berbasis data statistik resmi dan menggunakan Teori Pertumbuhan Populasi yang dikembangkan oleh Thomas Robert Malthus (1798) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Paul Ehrlich (1968).

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan satu anak berdampak pada penurunan fertilitas, faktor lain seperti urbanisasi dan modernisasi juga turut berperan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, studi Giestel-Basten lebih berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan dari perspektif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

Ketiga penelitian di atas memberikan wawasan yang berharga mengenai dampak kebijakan satu anak di Tiongkok, tetapi penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatannya. Penelitian Grimbert (2024) berfokus pada periode setelah 2017, Wabilia Husna (2016) menyoroti aspek gender, dan Giestel-Basten (2019) mengevaluasi efektivitas kebijakan satu anak melalui pendekatan kuantitatif.

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menggabungkan analisis sosial, ekonomi, dan demografis

untuk melihat bagaimana kebijakan satu anak telah membentuk struktur populasi dan nilai sosial di Tiongkok dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi studi sebelumnya tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam memahami interaksi antara kebijakan populasi, modernisasi, dan perubahan sosial di Tiongkok.

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi mengenai kebijakan satu anak di Tiongkok berfokus pada dampaknya terhadap aspek demografi, ekonomi, dan struktur keluarga secara makro. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan fondasi penting dalam memahami konteks kebijakan dan konsekuensi jangka panjangnya, namun masih terdapat celah kajian (research gap) yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat dinamika sosial dan nilai keluarga di tengah kebijakan satu anak dan masa transisinya ke kebijakan dua dan tiga anak, khususnya dari perspektif masyarakat urban modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus yang telah ada, tetapi juga memperluas cakupan analisis dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada perubahan nilai, respons sosial, dan arah kebijakan yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi pembeda utama antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.8. KONSEP

1.8.1. Penurunan Populasi

Konsep penurunan populasi merujuk pada fenomena ketika jumlah penduduk suatu negara mengalami penurunan secara signifikan dari waktu ke waktu. Penurunan ini dapat disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran, meningkatnya angka kematian, atau migrasi keluar dalam skala besar. Dalam konteks Tiongkok, fenomena ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan satu anak yang diberlakukan dari tahun 1980 hingga 2015, yang secara langsung menurunkan angka kelahiran di seluruh wilayah negara tersebut.

Penurunan populasi memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk dinamika demografi, struktur sosial, dan perekonomian. Salah satu indikator utama dari fenomena ini adalah penurunan Tingkat Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR), yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya. Jika TFR turun di bawah tingkat penggantian generasi (replacement level), yakni sekitar 2,1 anak per perempuan, maka dalam jangka panjang populasi akan mengalami penurunan. Di Tiongkok, TFR menurun dari 2,75 anak per perempuan pada tahun 1980 menjadi sekitar 1,6 pada tahun 2000, dan terus turun hingga mendekati 1 pada tahun 2020-an (Cai, 2010; Zeng, 2008).

Menurut teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Caldwell (2007), penurunan angka kelahiran sering kali terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan struktur masyarakat dari agraris

menjadi industri. Dalam fase ini, keluarga tidak lagi bergantung pada anak sebagai aset produktif, dan nilai sosial terhadap keluarga besar mulai tergeser. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana modernisasi dan industrialisasi di Tiongkok mempercepat transisi ke struktur populasi yang lebih kecil.

Selain kebijakan, urbanisasi dan modernisasi turut menjadi pendorong penting dalam penurunan populasi. Migrasi dari pedesaan ke kota membawa perubahan gaya hidup dan orientasi hidup masyarakat. Kehidupan perkotaan yang lebih kompetitif dan mahal membuat banyak pasangan memilih untuk memiliki sedikit anak atau menunda memiliki anak. Guo et al. (2012) menekankan bahwa tekanan ekonomi, biaya hidup yang tinggi, serta fokus pada pendidikan dan karier menjadi hambatan utama bagi keluarga muda untuk memiliki lebih dari satu anak.

Perubahan nilai sosial di masyarakat modern juga menjadi faktor penting dalam fenomena ini. Dalam masyarakat tradisional, memiliki banyak anak dianggap sebagai simbol keberhasilan dan keamanan ekonomi. Namun, di era modern, anak-anak lebih sering dipandang sebagai tanggungan finansial yang besar. Menurut Li et al. (2017), generasi muda semakin menekankan pada pengembangan diri dan stabilitas finansial sebelum memutuskan untuk menikah atau memiliki anak, yang akhirnya mempercepat penurunan kelahiran.

Dampak dari penurunan populasi sangat luas dan bersifat jangka panjang. Salah satu dampak yang paling nyata adalah penuaan penduduk. Ketika angka kelahiran menurun secara terus-menerus, proporsi penduduk lansia meningkat tajam. Proyeksi dari PBB menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, termasuk Tiongkok, lebih dari 30% penduduk akan berusia di atas 60 tahun pada tahun 2050. Ini membawa tantangan besar bagi sistem jaminan sosial dan kesehatan masyarakat, terutama karena jumlah tenaga kerja produktif semakin menurun.

Penurunan jumlah penduduk usia kerja juga menimbulkan tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Wang dan Mason (2005) mencatat bahwa krisis tenaga kerja akibat penuaan populasi dapat menghambat proses regenerasi ekonomi dan menurunkan daya saing global. Industri padat karya seperti manufaktur akan terdampak langsung, karena kekurangan tenaga kerja menyebabkan turunnya produktivitas dan inovasi.

Secara keseluruhan, penurunan populasi adalah fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan, tetapi juga oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Konsep ini penting dalam memahami dampak jangka panjang dari kebijakan populasi seperti kebijakan satu anak di Tiongkok, khususnya dalam konteks struktur demografi, keberlanjutan tenaga kerja, dan keseimbangan pembangunan sosial-ekonomi negara.

1.8.2. Tingkat Fertilitas

Tingkat fertilitas atau *fertility rate* merupakan indikator demografi yang digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya (biasanya usia 15–49 tahun). Konsep ini penting dalam studi kependudukan karena menjadi penentu utama dalam perubahan struktur populasi suatu negara. Tingkat fertilitas yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan penduduk secara cepat, sementara tingkat fertilitas yang rendah dapat menyebabkan penyusutan populasi, terutama bila turun di bawah tingkat penggantian (*replacement level*) yang berada di kisaran 2,1 anak per perempuan.

Dalam konteks kebijakan satu anak di Tiongkok, tingkat fertilitas menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap dinamika populasi. Sejak kebijakan diberlakukan pada tahun 1979, tingkat fertilitas di Tiongkok mengalami penurunan yang sangat signifikan. Menurut data World Bank dan Worldometers (2024), tingkat fertilitas Tiongkok turun dari sekitar 2,6 pada tahun 1980 menjadi hanya 1,09 pada tahun 2023. Penurunan ini bahkan berlanjut meskipun kebijakan telah dilonggarkan menjadi dua anak (2016) dan tiga anak (2021). Artinya, kebijakan satu anak bukan hanya mengubah angka kelahiran secara langsung, tetapi juga membentuk norma dan nilai baru dalam masyarakat yang berkontribusi pada keputusan individu untuk memiliki lebih sedikit anak.

Tingkat fertilitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti tingkat pendidikan perempuan, urbanisasi, biaya hidup, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dalam teori transisi demografi, penurunan tingkat fertilitas dianggap sebagai bagian alami dari perkembangan masyarakat dari agraris ke industri. Namun, dalam kasus Tiongkok, penurunan ini dipercepat oleh kebijakan negara yang bersifat koersif dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yang menyebabkan ketidakseimbangan struktural antara usia produktif dan usia non-produktif.

Dalam penelitian ini, tingkat fertilitas tidak hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan nilai sosial dalam masyarakat Tiongkok. Penundaan pernikahan, ketidakstabilan pekerjaan, serta preferensi terhadap kehidupan yang lebih individualistik telah menjadi bagian dari pola sosial baru di kalangan generasi muda, terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu, penurunan fertilitas tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kebijakan pengendalian populasi, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi kebijakan pronatalis di masa depan.

1.8.3. Modernisasi Nilai Sosial

Konsep modernisasi nilai sosial merujuk pada perubahan sistem nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi, urbanisasi, serta kebijakan negara. Dalam konteks perubahan sosial, konsep ini mencakup transformasi yang terjadi secara bertahap dalam

struktur keluarga, peran gender, serta nilai-nilai individu. Inglehart dan Welzel (2005) menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada nilai-nilai tradisional dan kolektivisme, modernisasi cenderung mengarah pada penguatan nilai-nilai individualisme, otonomi pribadi, dan pencapaian karier.

Perubahan sosial budaya ini sering kali dipicu oleh kebijakan pemerintah dan perkembangan ekonomi yang memperkenalkan standar hidup baru. Di Tiongkok, modernisasi sosial terjadi seiring dengan penerapan kebijakan satu anak dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perubahan tersebut menggeser orientasi masyarakat dari kehidupan kolektif dan keluarga besar menuju gaya hidup perkotaan yang lebih fokus pada efisiensi dan mobilitas individu.

Pergeseran nilai juga terlihat dalam pola pikir generasi muda yang cenderung menunda pernikahan dan memilih membangun keluarga kecil. Dalam situasi ekonomi yang menuntut kestabilan finansial dan produktivitas, pasangan muda sering kali memprioritaskan karier dan kualitas hidup sebelum membentuk keluarga. Tian (2017) mencatat bahwa fenomena ini umum terjadi di negara-negara yang mengalami industrialisasi cepat seperti Tiongkok, di mana urbanisasi dan biaya hidup tinggi menjadi faktor penentu keputusan keluarga.

Transformasi peran gender merupakan salah satu aspek penting dari modernisasi nilai sosial. Akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan profesional memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Goldscheider et al. (2015) menyebutkan bahwa dalam masyarakat modern, perempuan memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan membentuk keluarga dan memiliki anak. Pergeseran ini turut memengaruhi struktur sosial dan menantang peran domestik perempuan yang sebelumnya dominan dalam budaya tradisional.

Modernisasi nilai sosial juga berdampak pada persepsi terhadap pernikahan dan pengasuhan anak. Xu et al. (2016) menemukan bahwa orang tua di Tiongkok mulai menekankan pentingnya pendidikan dan pencapaian anak sebagai bentuk investasi masa depan. Dalam konteks keluarga kecil dengan satu anak, perhatian dan ekspektasi yang tinggi terhadap anak menjadi sangat intens, melahirkan fenomena yang dikenal sebagai "Little Emperor Syndrome". Fenomena ini mencerminkan perubahan mendalam dalam struktur sosial dan harapan keluarga terhadap generasi penerus.

Lebih jauh, kebijakan satu anak turut memengaruhi keputusan generasi muda dalam hal pernikahan dan memiliki anak. Hsu (2022) mencatat bahwa banyak individu di kota-kota besar Tiongkok memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena tekanan ekonomi dan meningkatnya fokus pada pengembangan diri. Pilihan ini mencerminkan

perubahan nilai sosial yang lebih mengutamakan independensi dan pencapaian pribadi.

Perubahan norma gender juga menjadi konsekuensi langsung dari modernisasi nilai sosial. Semakin banyak perempuan yang memilih untuk tetap bekerja setelah menikah atau bahkan menunda memiliki anak demi mempertahankan karier dan kebebasan pribadi. Menurut Goldscheider et al. (2015), transformasi peran gender ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan negara dapat memicu penyesuaian nilai dan perilaku masyarakat dalam skala yang luas.

Dengan demikian, konsep modernisasi nilai sosial menggambarkan bagaimana transformasi ekonomi dan kebijakan negara dapat memicu perubahan mendasar dalam struktur keluarga, peran gender, serta orientasi hidup masyarakat. Dalam konteks Tiongkok, modernisasi nilai sosial berlangsung seiring dengan kebijakan satu anak dan menjadi bagian penting dari dinamika sosial yang memengaruhi keputusan reproduktif, pernikahan, dan kehidupan keluarga.

1.9. LANDASAN TEORI

1.9.1. *Population Control Theory*

Population Control Theory atau Teori Pengendalian Populasi pertama kali dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798). Dalam teorinya, Malthus berargumen bahwa pertumbuhan populasi bersifat eksponensial, sedangkan ketersediaan pangan dan sumber daya meningkat secara linear. Ketimpangan ini, jika dibiarkan tanpa kendali, akan menyebabkan krisis seperti kelaparan, kemiskinan, dan konflik sosial.

Untuk menghindari hal tersebut, Malthus menyarankan dua bentuk pengendalian: preventif (seperti penundaan pernikahan dan moral restraint) dan represif (seperti kelaparan, penyakit, dan perang). Teori ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara modern dalam merumuskan kebijakan pengendalian populasi yang lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu implementasi ekstrem dari teori ini adalah kebijakan satu anak di Tiongkok yang diterapkan pada tahun 1980. Pemerintah Tiongkok melihat ledakan penduduk sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, sehingga mengadopsi strategi pembatasan kelahiran secara nasional. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip dasar Malthusian bahwa kendali atas angka kelahiran merupakan kunci bagi kestabilan sosial dan pembangunan.

Melalui kebijakan tersebut, negara menggunakan berbagai mekanisme seperti insentif bagi keluarga yang taat, denda bagi pelanggar, dan

dalam beberapa kasus, tindakan koersif seperti aborsi dan sterilisasi paksa. Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan pada peran negara sebagai aktor utama dalam mengatur kehidupan reproduktif warganya demi mencapai stabilitas demografi.

Namun, penerapan teori ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang lebih luas. Cai (2010) mengingatkan bahwa keberhasilan penurunan angka kelahiran di Tiongkok tidak semata-mata karena kebijakan satu anak, melainkan juga karena urbanisasi, naiknya biaya hidup, dan perubahan nilai masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Artinya, efektivitas pengendalian populasi tidak bisa hanya dinilai dari regulasi, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Hsu (2022) menjelaskan bahwa setelah kebijakan satu anak dihapus dan diganti dengan kebijakan dua dan tiga anak, angka kelahiran tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kendali negara memiliki batas ketika nilai dan preferensi individu telah berubah. Pasangan muda enggan memiliki anak lebih banyak karena tekanan ekonomi, tuntutan karier, dan kurangnya dukungan sosial bagi pengasuhan anak.

Dalam konteks ini, pemikiran Goldscheider et al. (2015) menjadi relevan. Mereka menyoroti bahwa perubahan peran gender, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta nilai-nilai individualisme berkontribusi besar terhadap rendahnya tingkat fertilitas. Fenomena ini menandai bahwa teori pengendalian populasi perlu beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat modern yang semakin otonom dan dinamis.

Secara statistik, kebijakan satu anak memang berhasil menurunkan tingkat fertilitas secara drastis dari 2,75 anak per perempuan pada 1980 menjadi di bawah 1,3 pada 2020-an. Namun, keberhasilan ini menimbulkan dampak baru seperti penuaan populasi, penyusutan tenaga kerja produktif, dan ketimpangan rasio gender yang menciptakan potensi instabilitas sosial di masa depan.

Selain itu, kebijakan ini mengubah struktur sosial masyarakat Tiongkok secara signifikan. Terjadi pergeseran dari keluarga besar menjadi keluarga inti, dan anak tunggal menjadi tumpuan seluruh harapan keluarga. Fenomena “Little Emperor Syndrome” menunjukkan tekanan sosial dan psikologis yang muncul akibat struktur keluarga yang berubah.

Menurut Greenhalgh (2003), kebijakan populasi di Tiongkok mencerminkan praktik *biopolitik*, yaitu bagaimana negara mengatur tubuh dan kehidupan biologis warganya melalui kebijakan reproduksi. Negara tidak hanya mengatur jumlah kelahiran, tetapi juga membentuk norma sosial yang

menginternalisasi peran reproduktif sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional.

Dengan demikian, Population Control Theory tetap menjadi kerangka teoritis yang penting dalam memahami kebijakan satu anak di Tiongkok. Namun, teori ini perlu dibaca dalam lanskap sosial yang lebih luas, di mana perubahan nilai, tekanan ekonomi, dan peran gender turut menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, teori pengendalian populasi digunakan untuk menganalisis bagaimana negara membentuk kebijakan demografisnya, serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap struktur sosial dan nilai budaya masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan keterkaitan antara ideologi negara dan dinamika populasi secara lebih komprehensif.

1.9.2. Biopolitik (Biopolitics)

Konsep *biopolitik* diperkenalkan oleh Michel Foucault dalam kuliah tahun 1975–1976 yang dikompilasi dalam buku *Society Must Be Defended* (2003). Biopolitik merujuk pada cara negara modern mengelola kehidupan populasi secara sistematis, melalui kebijakan, regulasi, dan intervensi kesehatan, fertilitas, hingga kematian. Menurut Foucault, kekuasaan modern tidak lagi bersifat represif semata, melainkan produktif—ia memproduksi norma, mengatur tubuh, dan mengelola hidup warga negara demi stabilitas negara.

“Biopolitics deals with the population as a political problem, as a problem that is at once scientific and political, as a biological problem and as power’s problem.”

— Foucault, 2003, *Society Must Be Defended*, p. 245

Dalam kerangka ini, kebijakan satu anak di Tiongkok dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan biopolitik, di mana negara mengontrol reproduksi masyarakat melalui sistem regulasi, insentif, dan hukuman. Foucault menyebut ini sebagai pergeseran dari *“kekuasaan yang mengambil nyawa”* (*power to kill*) menjadi *“kekuasaan yang mengatur kehidupan”* (*power to make live and let die*).

“The power to make live and to let die – that is what I call biopower.”

— Foucault, 2003, p. 247

Dalam konteks Tiongkok, biopolitik terlihat dalam bagaimana negara mengintervensi jumlah anak, jenis kelamin yang diinginkan, hingga struktur keluarga, demi tujuan makro seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Kebijakan satu anak bukan hanya peraturan administratif, tetapi juga mekanisme untuk mengatur kehidupan biologis warganya.

Kebijakan satu anak di Tiongkok merupakan bentuk konkret dari praktik biopolitik: negara mengatur tubuh dan keputusan reproduksi individu atas nama kepentingan nasional. Dengan cara ini, negara menjadi agen yang mengintervensi wilayah paling pribadi dan biologis dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran dan keluarga. Biopolitik bekerja bukan hanya lewat hukum atau sanksi, tetapi melalui normalisasi nilai dan pembentukan perilaku masyarakat sesuai kepentingan negara.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan biopolitik membantu menjelaskan bagaimana kebijakan populasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai cara negara untuk membentuk struktur sosial dan nilai-nilai keluarga secara sistemik.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1.JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis isi kebijakan dan literatur yang berkaitan dengan demografi Tiongkok. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena kebijakan satu anak dalam konteks sosial, budaya, dan politik secara mendalam.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber tertulis.

2.2.SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi dan publikasi pemerintah, seperti:

- Laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok terkait angka kelahiran dan populasi.
- Publikasi dari United Nations Population Division mengenai tren demografi global.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber akademik dan media, meliputi:

- Jurnal akademik dan publikasi ilmiah yang membahas kebijakan satu anak dan dampaknya.
- Artikel berita dan laporan media dari sumber kredibel yang menggambarkan dampak sosial dan ekonomi kebijakan tersebut.

2.3.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode berikut:

1. Studi Literatur

Mengkaji jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya mengenai kebijakan satu anak. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dari database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan World Bank Reports.

2. Analisis Data Statistik

Penulis mengambil data dari sumber resmi seperti World Bank, IMF, dan sensus nasional Tiongkok. Selain itu dilakukan juga analisis tren angka kelahiran, rasio jenis kelamin, dan populasi lansia.

3. Analisis Berita dan Opini Publik

Menggunakan artikel dari media internasional dan lokal untuk melihat bagaimana kebijakan ini dipahami oleh masyarakat

2.4.TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi : Menentukan data yang relevan dengan penelitian, seperti tren penurunan populasi, perubahan sosial, dan dampak ekonomi.
2. Klasifikasi : Mengelompokkan data berdasarkan kategori utama, seperti perubahan angka kelahiran, ketidakseimbangan gender, dan dampak sosial-ekonomi.
3. Analisis Perbandingan : Membandingkan data dari berbagai sumber dan periode waktu untuk memahami pola perubahan populasi dan implikasinya.
4. Interpretasi Hasil : Menyusun pembahasan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan.
5. Penarikan Kesimpulan : Menghasilkan simpulan akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian